# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Dari beberapa permasalahan yang penulis kiemukakan di atas, maka pada Bab penutup ini dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan perundangan yang mengatur tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Indonesia, termasuk di Polrestabes Medan, mencakup berbagai ketentuan yang bertujuan untuk mengatur keselamatan lalu lintas dan menetapkan sanksi bagi pelanggaran. Berdasarkan analisis, peraturan ini sudah mencakup aspek-aspek penting seperti pelanggaran kecepatan, mengemudi dalam keadaan mabuk, dan kondisi kendaraan. Namun, penerapan peraturan ini di lapangan sering kali menghadapi tantangan, seperti implementasi yang tidak konsisten dan keterbatasan dalam pengawasan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk memperkuat dan menegakkan peraturan perundangan tersebut secara lebih konsisten dan efektif.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2698/Pid.Sus/2018/PN Lbp menunjukkan adanya penekanan pada aspek pembuktian kesalahan dan penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggaran dan dampak kecelakaan. Hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk niat, tingkat kesalahan, dan dampak sosial-ekonomi dari kecelakaan tersebut. Keputusan hakim mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara memberikan keadilan bagi korban dan keluarga serta menegakkan hukum

secara adil terhadap pelanggar. Namun, proses pertimbangan ini sering kali memerlukan waktu yang lama dan dapat menghadapi kendala dalam memastikan bahwa semua aspek kasus ditangani dengan tepat. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi dalam proses hukum dan pertimbangan yang lebih mendalam dalam setiap kasus sangat penting untuk mencapai keadilan yang optimal.

1. Solusi untuk mengatasi tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kehilangan nyawa melibatkan beberapa langkah strategis. Pertama, penegakan hukum yang lebih ketat dan peningkatan kesadaran publik tentang keselamatan berkendara harus diperkuat untuk mencegah pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Kedua, perbaikan sistem penanganan kasus melalui penggunaan teknologi canggih dan optimasi proses hukum diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyidikan dan persidangan. Ketiga, regulasi dan pengawasan yang lebih ketat, serta dukungan yang memadai bagi korban dan keluarga, sangat penting untuk mengurangi dampak kecelakaan dan memastikan keadilan. Implementasi solusi ini harus melibatkan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan berkeadilan.

## B. Saran

1. Untuk memberikan pemikiran dalam perkembangan ilmu hokum kepada penelitian lebih lanjut, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi yang menyebabkan korban meninggal dunia.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahan di bidang hukum dalam hal peran kepolisian dalam penyidikan, Hakim, Jaksa terkait penegakan hukum dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi yang menyebabkan korban meninggal dunia.